

OPTIMALISASI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN MELALUI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DI PROVINSI LAMPUNG

MUHAMMAD AGSHAL ABDALLAH

NPP. 32.0287

Asdaf Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung
Program Studi Keuangan Publik

Email: 32.0287@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Dadang Suwanda, SE, MM, MAK, Ak, CA

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Although the Local Government Information System (SIPD) aims to improve the quality of financial reports, its implementation in Lampung Province is empirically constrained by problems of system access, data input, and limited staff training. This condition contributes to a decline in the quality of financial reports, as evidenced by the change in the BPK opinion from WTP to WDP in 2021. **Purpose:** This study aims to analyze the process of optimizing financial report quality through the implementation of SIPD in Lampung Province. **Method:** This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation. The analysis is based on three elements of optimization according to Siringoringo (2005): resource utilization, process control, and result monitoring. **Results/Findings:** The results of the study show that in the dimension of resource utilization, it was found that the technological infrastructure was not fully stable, server limitations, and lack of device readiness in several OPDs were the main obstacles in implementing SIPD, in the process control dimension there were still input errors, and in the results monitoring dimension, the lack of understanding of OPDs in analyzing reports, the lack of alignment between financial reports and strategic needs, and the still limited training related to data utilization in regional policies were some of the main obstacles. On the other hand, the Lampung Provincial Government has made a number of efforts such as increasing network capacity, intensive training, improving SOPs, and developing an automatic monitoring system. **Conclusion:** Optimizing the quality of financial reports through SIPD in Lampung Province is highly dependent on the synergy between technological readiness, human resource development, and the sustainability of policies and oversight. With continuous improvement efforts, SIPD has the potential to become a key tool in achieving more accountable and transparent local government financial management. **Keywords:** Local Government Information System (SIPD), Financial Reports, Optimization, Local Government, Lampung Province.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Meskipun Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) bertujuan meningkatkan kualitas laporan keuangan, implementasinya di Provinsi Lampung secara empiris masih terkendala oleh masalah akses sistem, input data, dan keterbatasan pelatihan pegawai. Kondisi ini berkontribusi pada penurunan kualitas laporan keuangan, terbukti dengan

berubahnya opini BPK dari WTP menjadi WDP pada tahun 2021. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses optimalisasi kualitas laporan keuangan melalui penerapan SIPD di Provinsi Lampung. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan berdasarkan tiga elemen optimalisasi menurut Siringoringo (2005): pemanfaatan sumber daya, pengendalian proses, dan pemantauan hasil. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi pemanfaatan sumber daya ditemukan Infrastruktur teknologi yang belum sepenuhnya stabil, keterbatasan server, serta kurangnya kesiapan perangkat di beberapa OPD menjadi kendala utama dalam penerapan SIPD, pada dimensi pengendalian proses masih terdapat kesalahan input, dan pada dimensi pemantauan hasil Kurangnya pemahaman OPD dalam menganalisis laporan, kurangnya keselarasan antara laporan keuangan dengan kebutuhan strategis, serta masih terbatasnya pelatihan terkait pemanfaatan data dalam kebijakan daerah menjadi beberapa kendala utama. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan sejumlah upaya seperti peningkatan kapasitas jaringan, pelatihan intensif, penyempurnaan SOP, serta pengembangan sistem monitoring otomatis. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa Optimalisasi Kualitas Laporan Keuangan Melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Provinsi Lampung belum berjalan optimal.

Kata Kunci: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Laporan Keuangan, Optimalisasi, Pemerintah Daerah, Provinsi Lampung.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah merupakan elemen vital dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Setiap pemerintah daerah diwajibkan untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efisien dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktiknya, banyak pemerintah daerah yang mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Salah satu masalah yang sering muncul adalah kualitas laporan keuangan yang masih jauh dari harapan, seperti ketidaktepatan waktu penyusunan, kesalahan dalam pencatatan, serta kurangnya transparansi. Halim (2012) menyatakan bahwa “Salah satu kendala utama dalam pengelolaan keuangan daerah adalah keterbatasan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan sistem akuntansi pemerintahan secara memadai, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengelolaan keuangan.” Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 memperkenalkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Pada pasal 4 berbunyi bahwa “Mengatur bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan dan mengelola informasi terkait pembangunan dan keuangan daerah dalam SIPD, sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.” SIPD dirancang untuk membantu pemerintah daerah dalam mengelola informasi pembangunan, keuangan, dan pemerintahan secara terintegrasi. Tujuan utama dari SIPD adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih akurat, transparan, dan dapat diandalkan. SIPD merupakan inovasi yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Penerapan SIPD memungkinkan integrasi yang lebih baik antara berbagai informasi terkait pembangunan dan keuangan daerah (Tumija dkk., 2023). SIPD juga mempermudah pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi keuangan, sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan berdasarkan data yang akurat

dan terkini. Hal ini tentu saja berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi dalam pengelolaan keuangan, yang pada akhirnya dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. SIPD juga berperan penting dalam mempercepat proses audit internal dan eksternal (Tumija & Erlambang, 2023). Sistem ini memungkinkan auditor untuk mengakses data secara real-time, sehingga proses audit dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Di sisi lain, SIPD juga membantu mengurangi potensi kesalahan dalam pencatatan, yang sering kali menjadi masalah utama dalam pengelolaan keuangan daerah.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Secara empiris, banyak daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Lampung masih menghadapi berbagai masalah dalam penerapan SIPD. Berdasarkan laporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, beberapa kendala utama yang dihadapi dalam implementasi SIPD meliputi lambatnya akses ke sistem, ketidakcocokan data yang diinput, serta keterbatasan pelatihan bagi pegawai yang bertugas. Masalah-masalah ini mengakibatkan penurunan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, seperti yang terlihat dari penurunan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2021 (Laporan Evaluasi Penggunaan SIPD, BPKAD Lampung, 2023).

1.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam berbagai pendekatan seperti (Nasution, M. I., & Si, N. M. 2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD khususnya di Kota Medan belum terlaksana dengan baik karena kualitas sistem yang masih kurang, selain itu kurangnya efisiensi dari segi waktu atau singkatnya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pembinaan teknis menyebabkan banyak SKPD belum terbiasa menggunakan SIPD. (Ekaputra, N. D. 2021). Efektivitas Penerapan aplikasi Sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) dalam penyusunan dokumen RKPD DI Kabupaten Nganjuk. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi SIPD masih kurang efektif di tahun pertama penerapannya.

(Riani, D., Putri, G. A. A., & Pratama, I. P. A. E. 2021). E-Readiness Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Menggunakan Metode Technology Acceptance Model (TAM) (Studi Kasus Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar). Hasil akhir penelitian menunjukkan sebanyak 70% pegawai sudah memiliki pengalaman dalam menggunakan sistem e-government, 35% pegawai tidak merasa bahwa SIPD rumit, 45% pegawai merasa tidak memiliki hambatan waktu dalam mempelajari dan menggunakan SIPD, 68,3% pegawai berpendapat bahwa SIPD berguna dalam membantu pekerjaan, 51,7% pegawai berpendapat bahwa SIPD mudah digunakan, 73% pegawai memiliki intensi yang tinggi terhadap SIPD, dan sebanyak 50,8% pegawai menggunakan SIPD secara langsung.

(Adisi, C. A., & Sadad, A. 2022). Efektivitas program sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) pada Kantor BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu. asil dari penelitian ini adalah program SIPD pada BPKAD sudah cukup efektif. Faktor penghambat yang ditemukan masih terjadi error jaringan, tidak bisa membuat template sehingga penggunaan SIPD pada BPKAD masih menggunakan aplikasi pendamping yang diukur dari indikator pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata. (Fahzura, L., & Najamudin, N. 2022). Implementasi

Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa penerapan aplikasi sistem Informasi Pembangunan Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Barat belum optimal. (Balqis, N., & Fadhly, Z. 2021). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distranaker) Kabupaten Aceh Barat. Kesimpulan yang diperoleh penulis berdasarkan penelitian analitis tentang penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di titik kualitas SIPD adalah bahwa penerapan SIPD telah praktis. (Pramana, A. C., Yap, N., Rukmini, M., Mahmudi, S., & Agustina, E. 2023). Analisis Penerapan SIPD Pada BPKAD Kabupaten Nganjuk. Hasil dari penelitian ini adalah SIPD masih memiliki kelemahan atau kendala dalam penerapannya, diantaranya adalah kurang efektif dan efisien, lemot, dan masih perlu didampingi oleh system yang lain.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan pendekatan yang berbeda dari studi-studi sebelumnya. Penelitian ini memanfaatkan kondisi yang aktual serta melibatkan informan yang lebih beragam dan luas. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan (Nasution, M. I., & Si, N. M. 2021). Masalah penyusunan laporan, (Ekaputra, N. D. 2021). Mengkaji efektivitas SIPD dengan teori UTAUT, (Riani, D., Putri, G. A. A., & Pratama, I. P. A. E. 2021). menekankan evaluasi efektivitas SIPD dengan sorotan kendala teknis dan kompetensi pegawai. (Adisi, C. A., & Sadad, A. 2022). meneliti pengaruh SIPD dan kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan dengan pengujian empiris. (Fahzura, L., & Najamudin, N. 2022). penekanan pada kendala teknis implementasi SIPD. (Balqis, N., & Fadhly, Z. 2021). Pada tahap perencanaan anggaran. (Pramana, A. C., Yap, N., Rukmini, M., Mahmudi, S., & Agustina, E. 2023). Fokus pada pengelolaan belanja daerah. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada aplikasi yang dipakai menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Fokus utama kesenjangan penelitian (research gap) yang diangkat adalah permasalahan khas yang secara spesifik ditemukan di Provinsi Lampung, yaitu upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Perbedaan signifikan lainnya terletak pada penggunaan teori optimalisasi dari Siringoringo (2005), yang dirumuskan dengan indikator-indikator spesifik. Menurut Siringoringo, terdapat tiga elemen fundamental dalam proses optimalisasi: Pemanfaatan Sumber Daya, Pengendalian Proses, dan Pemantauan Hasil..

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses optimalisasi kualitas laporan keuangan melalui penerapan SIPD Di Provinsi Lampung.

II. METODE

Penelitian adalah suatu proses untuk memperoleh pengetahuan baru dengan pendekatan sistematis yang melibatkan perencanaan dan intervensi yang tekun untuk penemuan atau interpretasi informasi yang baru diperoleh (Garg, 2016). Untuk menginvestigasi realitas sosial dan fenomena rumit secara komprehensif, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dinilai tepat untuk mendalami optimalisasi kualitas laporan keuangan melalui penerapan Sistem

Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang melibatkan beragam aktor, proses, serta dinamika institusi dan teknologi. Metode kualitatif dianggap paling sesuai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bersifat eksploratif dan interpretatif. (Nurdin & Hartati, 2019) mengatakan Metode penelitian kualitatif sering juga disebut sebagai metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga metode ethnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut (Crowther & Lauesen, 2017) diekspresikan dalam bahasa alami, menggunakan sampel kecil yang dipilih secara oportunistik atau purposif, dan sering fokus pada individu, peristiwa, dan konteks tertentu. Pendekatan ini cocok untuk analisis idiografis yang mendalami kasus-kasus spesifik. Penelitian kualitatif dapat menafsirkan secara langsung keadaan yang ada dilapangan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam suatu penelitian.

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai optimalisasi kualitas laporan keuangan melalui SIPD, pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*. Informan dipilih berdasarkan kapasitas, pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung mereka dalam proses perencanaan, implementasi, pengelolaan, dan penggunaan SIPD serta penyusunan laporan keuangan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Informan kunci dalam penelitian ini meliputi: Kepala BPKAD, Sekretaris BPKAD, Kepala Bidang Keuangan, Kepala Bidang Teknologi Informasi, Kepala Sub Bidang Anggaran PPKD, dan Operator BPKAD. Alasan pemilihan informan tersebut adalah karena posisi dan peran strategis mereka dianggap mampu memberikan informasi yang komprehensif, beragam, dan mendalam sesuai dengan fokus penelitian, sehingga memungkinkan peneliti untuk menggali data secara kaya dan relevan untuk menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu 3 minggu dari 6 Januari sampai dengan 25 Januari 2025.

Simangunsong (2017:192) juga menjelaskan bahwa penelitian kualitatif meyakini bahwa fokus penelitian kualitatif adalah mencari makna. Oleh karena itu, harus diakui bahwa makna yang ditetapkan dalam penelitian kualitatif berbeda dengan ungkapan pertanyaan yang disusun menjadi “topik penelitian yang subjektif dan multipel”. Instrumen penelitian merupakan sebuah alat atau sarana yang digunakan peneliti untuk membantu dalam proses pengumpulan data agar proses tersebut bisa dipermudah. (Bhaskar & Manjuladevi, 2016) Mengatakan bahwa alat penelitian adalah sarana untuk mengumpulkan informasi untuk tujuan penelitian. Formulir observasi, jadwal, wawancara, kuesioner, semuanya diklasifikasikan sebagai penelitian alat penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis mengukur Optimalisasi Kualitas Laporan Keuangan Melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Di Provinsi Lampung menggunakan konsep optimalisasi oleh Siringoringo (2005). Menurutnya, ada tiga elemen kunci dalam proses optimalisasi yaitu: Pemanfaatan Sumber Daya, Pengendalian Proses, Pemantauan Hasil. Ketiga elemen ini bekerja secara sinergis untuk mencapai kualitas terbaik dalam sistem pelaporan keuangan.

1.1 Optimalisasi Kualitas Laporan Keuangan Melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Di Provinsi Lampung

1.1.1 Pemanfaatan Sumber Daya

Dalam proses optimalisasi kualitas laporan keuangan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Provinsi Lampung, pemanfaatan sumber daya menjadi dimensi krusial yang mencakup aspek ketersediaan dan penggunaan teknologi serta kompetensi sumber daya manusia (SDM). Meskipun SIPD dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan integrasi dalam pengelolaan keuangan daerah, temuan di lapangan menunjukkan bahwa pemanfaatan kedua sumber daya ini belum optimal dan masih menghadapi berbagai kendala signifikan yang berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

1. Ketersediaan dan Penggunaan Teknologi

mengenai ketersediaan dan penggunaan teknologi dalam implementasi SIPD di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa aspek ini masih menjadi tantangan utama. Berdasarkan wawancara dengan Kepala BPKAD, Dr. Marindo Kurniawan, S.T.,M.M, terungkap bahwa "stabilitas sistem yang belum optimal" dan sering terjadinya "keterlambatan atau error dalam penginputan data" saat banyak OPD mengakses sistem secara bersamaan menjadi kendala signifikan. Sekretaris BPKAD, Syafriyadi AP, MSi, juga menyoroti "ketersediaan server yang masih terbatas membuat sistem ini sering mengalami gangguan" dan beberapa OPD yang "perangkat teknologinya kurang mendukung". Operator BPKAD pun mengamini dengan menyatakan sering mengalami kendala karena "sistemnya kadang lambat atau bahkan tidak merespons dengan baik" dan proses perbaikan kesalahan input yang "cukup lama". Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun SIPD telah diimplementasikan, keterbatasan pada infrastruktur teknologi seperti stabilitas sistem, kapasitas server, dan kesiapan perangkat di OPD, serta masalah teknis seperti kelambatan akses dan error, secara substansial menghambat efektivitas penggunaan teknologi dalam mendukung kualitas laporan keuangan daerah.

2. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Kesimpulan terkait kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam pengoperasian SIPD di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa aspek ini juga menjadi kendala penting dalam optimalisasi kualitas laporan keuangan. Kepala BPKAD, Dr. Marindo Kurniawan, S.T.,M.M, mengakui bahwa "masih terbatasnya pegawai yang benar-benar memahami sistem ini dengan baik" dan sering terjadinya "kesalahan dalam penginputan data yang sering kali terjadi karena kurangnya pemahaman tentang standar akuntansi". Sekretaris BPKAD, Syafriyadi AP, MSi, menambahkan bahwa meskipun pelatihan telah diadakan, "belum semua pegawai dapat mengikuti pelatihan tersebut secara optimal" dan "jumlah tenaga ahli atau operator yang memahami SIPD secara teknis juga masih terbatas". Operator BPKAD juga menyoroti bahwa banyak OPD "masih belum memahami cara penginputan data yang benar" dan "pelatihan yang sudah diberikan masih kurang berkelanjutan". Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kompetensi SDM yang belum merata, kurangnya pemahaman mendalam terhadap sistem dan standar akuntansi, serta keterbatasan pelatihan yang berkelanjutan menjadi faktor penghambat signifikan dalam pemanfaatan SIPD secara optimal untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

1.1.2 Pengendalian Proses

Pengendalian proses dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Provinsi Lampung merupakan aspek fundamental untuk menjamin bahwa seluruh tahapan

pengelolaan keuangan daerah, mulai dari input data hingga pelaporan, berjalan sesuai dengan prosedur baku, efisien, dan akuntabel. Proses ini krusial untuk mencegah kesalahan, meningkatkan efisiensi, serta memastikan transparansi. Meskipun berbagai mekanisme pengendalian telah diterapkan, termasuk penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan upaya pemantauan penggunaan sistem, optimalisasinya masih menghadapi tantangan yang berdampak pada kualitas laporan keuangan daerah.

1. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Kesimpulan mengenai penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penggunaan SIPD di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa meskipun pedoman resmi telah disusun untuk mengatur setiap langkah pengelolaan keuangan, implementasinya di lapangan belum konsisten dan seragam di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kepala BPKAD Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, S.T.,M.M, menyatakan bahwa "tidak semua unit di OPD telah menerapkan SOP secara konsisten" dan "perbedaan interpretasi atas SOP yang ada menyebabkan beberapa kesalahan dalam pencatatan data". Sekretaris BPKAD, Syafriyadi AP, MSi, juga menambahkan bahwa masih ada kendala dari pihak OPD yang "terkadang belum sepenuhnya menyesuaikan proses kerjanya dengan standar operasional yang telah ditetapkan". Operator BPKAD pun mengungkapkan bahwa terkadang SOP yang diterapkan "kurang jelas atau belum sepenuhnya disosialisasikan kepada semua pengguna". Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun SOP telah ada dan upaya sosialisasi telah dilakukan, tantangan dalam konsistensi penerapan, pemahaman yang seragam, dan sosialisasi yang merata masih menghambat efektivitas SOP sebagai alat pengendalian proses penggunaan SIPD.

2. Pemantauan Proses Penggunaan Sistem

Kesimpulan terkait pemantauan proses penggunaan sistem SIPD di Provinsi Lampung mengindikasikan bahwa upaya pengawasan dan evaluasi telah dilakukan, namun masih menghadapi berbagai keterbatasan yang mengurangi efektivitasnya. Kepala BPKAD Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, S.T.,M.M, menjelaskan bahwa tantangan yang dihadapi adalah "tidak semua OPD memberikan laporan secara tepat waktu, dan masih ada kendala dalam konsistensi data yang diinput". Sekretaris BPKAD menyoroti "kurangnya sistem pelaporan otomatis yang dapat memberikan peringatan dini terhadap kesalahan input atau ketidaksesuaian data" dan pemantauan yang "masih dilakukan secara manual dengan melakukan pengecekan terhadap laporan yang masuk dari OPD". Operator BPKAD juga berharap adanya "sistem pemantauan yang lebih otomatis dan terintegrasi, sehingga proses validasi data bisa lebih cepat dan efisien" karena sering menemukan OPD yang terlambat menginput data atau melakukan kesalahan berulang. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa pemantauan proses penggunaan SIPD belum optimal karena masih bersifat manual, kurangnya sistem deteksi dini kesalahan otomatis, dan kendala dalam koordinasi serta ketepatan waktu pelaporan dari OPD, yang semuanya berdampak pada kualitas laporan keuangan daerah.

1.1.3 Pemantauan Hasil

Pemantauan hasil dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Provinsi Lampung merupakan tahap krusial untuk mengevaluasi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dan memastikan pemanfaatannya secara efektif dalam proses pengambilan keputusan. Proses ini bertujuan untuk menilai sejauh mana laporan keuangan mencerminkan kondisi riil keuangan daerah serta mendukung perumusan kebijakan yang akuntabel dan transparan. Meskipun upaya evaluasi dan pemanfaatan laporan telah dilakukan, optimalisasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi agar SIPD dapat memberikan kontribusi maksimal.

1. Evaluasi Kualitas Laporan Keuangan

Meskipun proses evaluasi rutin dilakukan untuk menilai akurasi, ketepatan waktu, dan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), masih terdapat sejumlah kendala signifikan. Kepala BPKAD Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, S.T.,M.M, mengungkapkan bahwa masih ada kendala seperti "ketidaktepatan dalam penginputan data oleh OPD yang menyebabkan laporan harus direvisi beberapa kali" dan kasus di mana "realisasi anggaran di lapangan tidak sepenuhnya sesuai dengan yang tercatat dalam sistem". Sekretaris BPKAD, Syafriyadi AP, MSi, juga menyoroti masalah "keterlambatan OPD dalam menginput data, yang berimbas pada keterlambatan penyusunan laporan secara keseluruhan". Operator BPKAD menambahkan bahwa sering ditemukan "data yang tidak sinkron antara yang diinput dengan yang seharusnya tercatat dalam sistem" dan "kesalahan dalam kode akun atau kategori belanja". Dengan demikian, disimpulkan bahwa proses evaluasi kualitas laporan keuangan masih terhambat oleh kesalahan input data, ketidaksesuaian data, keterlambatan penyusunan, dan perlunya verifikasi manual yang intensif, yang semuanya mengindikasikan perlunya peningkatan dalam proses input dan validasi data di SIPD serta peningkatan koordinasi antar OPD.

2. Penggunaan Hasil Laporan untuk Pengambilan Keputusan

Meskipun laporan tersebut telah menjadi salah satu dasar dalam perumusan kebijakan, pemanfaatannya belum optimal. Kepala BPKAD Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, S.T.,M.M, menjelaskan bahwa masih ada tantangan dalam "penyelarasan antara laporan keuangan dengan kebutuhan strategis pemerintah daerah" dan beberapa OPD "masih kurang memahami bagaimana menggunakan data dalam laporan keuangan sebagai acuan dalam perencanaan anggaran berikutnya". Sekretaris BPKAD, Syafriyadi AP, MSi., menambahkan bahwa meskipun laporan SIPD rinci, penggunaannya dalam pengambilan keputusan "masih memerlukan perbaikan," misalnya dalam "proses perencanaan anggaran, masih ada perbedaan antara proyeksi keuangan yang tertuang dalam laporan dan realisasi yang terjadi di lapangan". Operator BPKAD juga mengungkapkan bahwa beberapa OPD "belum sepenuhnya memahami bagaimana membaca laporan dan menggunakan informasi yang ada di dalamnya untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif". Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penggunaan laporan keuangan SIPD dalam pengambilan keputusan masih terkendala oleh kurangnya pemahaman OPD dalam menganalisis laporan, penyelarasan yang belum optimal antara laporan dengan kebutuhan strategis, serta terbatasnya sosialisasi dan pelatihan terkait pemanfaatan data untuk kebijakan yang lebih berbasis data.

1.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses optimalisasi kualitas laporan keuangan melalui penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Provinsi Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan efisiensi dan integrasi pelaporan keuangan, namun implementasinya belum berjalan optimal karena masih dihadapkan pada berbagai hambatan teknis maupun non-teknis. Temuan ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang juga mengidentifikasi berbagai tantangan dalam penerapan SIPD di daerah lain, meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam fokus dan hasil spesifik.

Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah adanya keterbatasan infrastruktur teknologi sebagai penghambat optimalisasi SIPD di Provinsi Lampung. Hal ini mencakup

masalah stabilitas sistem, keterbatasan kapasitas server, dan kurang mendukungnya perangkat teknologi di beberapa OPD, yang mengakibatkan keterlambatan akses dan error dalam penginputan data. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nasution & Si (2021) di Kota Medan yang menunjukkan bahwa kualitas sistem SIPD yang masih kurang menjadi salah satu faktor belum baiknya pelaksanaan SIPD. Senada dengan itu, Adisi & Sadad (2022) di Kabupaten Indragiri Hulu juga menemukan bahwa masih terjadinya error jaringan menjadi faktor penghambat, meskipun secara keseluruhan program SIPD dinilai cukup efektif.

Rendahnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi kendala signifikan dalam penelitian ini, dimana masih terbatasnya pegawai yang memahami sistem dengan baik, kesalahan input akibat kurangnya pemahaman standar akuntansi, serta pelatihan yang belum optimal dan berkelanjutan menjadi sorotan. Hal ini sangat relevan dengan temuan Fahzura & Najamudin (2022) di Kabupaten Aceh Barat yang mengindikasikan bahwa perilaku SDM belum siap menghadapi penerapan SIPD karena kurangnya sosialisasi dan pelatihan di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penelitian Ekaputra (2021) di Kabupaten Nganjuk juga menyoroti kurangnya pemahaman terhadap aplikasi sebagai hambatan efektivitas penggunaan SIPD. Lebih lanjut, Nasution & Si (2021) juga mencatat kurangnya efisiensi dari segi waktu atau singkatnya waktu pembinaan teknis menyebabkan banyak SKPD belum terbiasa menggunakan SIPD, yang mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan.

Aspek pengendalian proses, khususnya terkait penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum konsisten dan lemahnya sistem pemantauan, juga menjadi temuan penting di Provinsi Lampung. Ketidakkonsistenan penerapan SOP dan perbedaan interpretasi, serta sistem pemantauan yang masih manual dan kurangnya sistem deteksi dini kesalahan otomatis, menghambat optimalisasi SIPD. Meskipun penelitian terdahulu tidak secara eksplisit membahas SOP dan sistem pemantauan dengan detail yang sama, temuan umum mengenai belum optimalnya atau kurang efektifnya penerapan SIPD seperti yang diungkapkan oleh Nasution & Si (2021), Ekaputra (2021), dan Fahzura & Najamudin (2022) secara implisit mencerminkan adanya masalah dalam pengendalian proses dan pelaksanaan sistem. Penelitian Ekaputra (2021) juga menyinggung adanya kebingungan akibat perubahan nomenklatur program kegiatan yang dapat dikaitkan dengan tantangan dalam standarisasi dan pengendalian proses.

Berbeda dengan beberapa temuan yang menyoroti banyak kendala, penelitian Riani et al. (2021) di Kabupaten Gianyar yang menggunakan *Technology Acceptance Model (TAM)* menunjukkan hasil yang relatif positif terkait e-readiness pegawai terhadap SIPD. Mayoritas pegawai berpendapat SIPD berguna, mudah digunakan, dan memiliki intensi yang tinggi untuk menggunakannya. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh fokus penelitian yang berbeda, dimana penelitian di Gianyar lebih menekankan pada persepsi dan penerimaan pengguna, sementara penelitian ini dan beberapa penelitian lainnya lebih mendalam pada kendala implementasi aktual dan optimalisasi.

Penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengidentifikasi secara spesifik hambatan-hambatan dalam optimalisasi kualitas laporan keuangan melalui SIPD di Provinsi Lampung, terutama dalam konteks penurunan opini BPK dari WTP menjadi WDP. Penggunaan kerangka optimalisasi menurut Siringoringo (2005) yang mencakup pemanfaatan sumber daya, pengendalian proses, dan pemantauan hasil memberikan struktur analisis yang komprehensif. Upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung seperti peningkatan kapasitas jaringan, pelatihan intensif, penyempurnaan SOP, dan pengembangan sistem monitoring otomatis juga menjadi catatan penting yang menunjukkan adanya respons terhadap tantangan yang ada, yang mungkin belum banyak dieksplorasi dalam penelitian terdahulu. Dengan demikian,

penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai dinamika implementasi SIPD dan upaya optimalisasinya di tingkat pemerintah daerah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap optimalisasi kualitas laporan keuangan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Provinsi Lampung menurut Siringoringo (2005), dapat disimpulkan bahwa proses tersebut belum berjalan optimal meskipun SIPD telah memberikan kontribusi pada efisiensi dan integrasi. Pemanfaatan sumber daya masih terkendala oleh keterbatasan teknologi, seperti stabilitas sistem yang belum optimal, kapasitas server yang terbatas, dan perangkat yang kurang mendukung di OPD, yang menyebabkan keterlambatan dan error dalam penginputan data. Selain itu, kompetensi SDM juga menjadi hambatan signifikan, ditandai dengan terbatasnya pegawai yang memahami sistem dan standar akuntansi secara mendalam, serta pelatihan yang kurang berkelanjutan. Dari sisi pengendalian proses, penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) belum konsisten di seluruh OPD dan masih ada perbedaan interpretasi, sementara pemantauan proses penggunaan sistem masih bersifat manual, kurang otomatisasi dalam deteksi dini kesalahan, dan terkendala oleh ketepatan waktu pelaporan dari OPD. Terakhir, dalam pemantauan hasil, evaluasi kualitas laporan keuangan masih terhambat oleh kesalahan input data, ketidaksesuaian data, dan keterlambatan penyusunan. Penggunaan hasil laporan untuk pengambilan keputusan juga belum optimal karena kurangnya pemahaman OPD dalam menganalisis laporan dan penyesuaian yang belum maksimal dengan kebutuhan strategis daerah.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama pada aspek waktu dan biaya, yang berdampak pada kurang optimalnya pencapaian hasil yang diperoleh. Keterbatasan ini membatasi ruang gerak peneliti dalam memperluas cakupan data serta memperdalam analisis terhadap temuan yang ada. Oleh karena itu, diharapkan penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan dukungan waktu dan sumber daya yang lebih memadai, agar hasil yang dicapai lebih komprehensif dan mendalam.

Arah Masa Depan Penelitian (future work): Penulis menyadari bahwa temuan dalam penelitian ini masih bersifat awal dan memerlukan pendalaman lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar dilakukan penelitian lanjutan di lokasi serupa yang mengkaji topik Optimalisasi Kualitas Laporan Keuangan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Provinsi Lampung.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung beserta seluruh jajarannya atas kesempatan yang telah diberikan untuk melaksanakan penelitian ini. Penghargaan juga disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan berperan aktif dalam menyukseskan proses pelaksanaan penelitian ini.

VI. Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

Adisi, C. A., & Sadad, A. (2022). Efektivitas program sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) pada Kantor BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(3), 150-164. [Efektivitas Program Sistem Informasi Pemerintah Daerah \(SIPD\)](#)

- Balqis, N., & Fadhly, Z. (2021). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distranaker) Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Public Policy*, 7(2), 117-121. [Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah \(SIPD\) di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja \(Distranaker\) Kabupaten Aceh Barat | Balqis | Jurnal Public Policy](#)
- Bhaskar, S. B., & Manjuladevi, M. (2016). Methodology for research II. *Indian Journal of Anaesthesia*, 60(9), 646–651. <https://doi.org/10.4103/0019-5049.190620>
- Crowther, D., & Lauesen, L. M. (2017). Qualitative methods. *Handbook of Research Methods in Corporate Social Responsibility*, 225–229. <https://doi.org/10.4324/9781315672632-5>
- Ekaputra, N. D. (2021). Efektivitas Penerapan aplikasi Sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) dalam penyusunan dokumen RKPD DI Kabupaten Nganjuk. *Otonomi*, 21(1), 62-79. [Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah \(SIPD\) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk | Otonomi](#)
- Fahzura, L., & Najamudin, N. (2022). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat. *Journal of Social and Policy Issues*, 7-13. [Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah \(SIPD\) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat | Journal of Social and Policy Issues](#)
- Garg, R. (2016). Methodology for research I. *Indian Journal of Anaesthesia*, 60(9), 640–645. <https://doi.org/10.4103/0019-5049.190619>
- Halim, A., & Iqbal, M. (2012). Pengelolaan Keuangan Daerah. UPP STIM YKPN.
- Nasution, M. I., & Si, N. M. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109-116. [ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH \(SIPD\) PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH \(BPKAD\) KOTA MEDAN | Nasution | Jurnal Akuntansi dan Keuangan](#)
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Surabaya.
- Pramana, A. C., Yap, N., Rukmini, M., Mahmudi, S., & Agustina, E. (2023). Analisis Penerapan SIPD Pada BPKAD Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Ekuivalensi*, 9(1), 45-58. [Analisis Penerapan SIPD Pada BPKAD Kabupaten Nganjuk | JURNAL EKUIVALENSI](#)
- Riani, D., Putri, G. A. A., & Pratama, I. P. A. E. (2021). E-Readiness Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Menggunakan Metode Technology Acceptance Model (TAM)(Studi Kasus Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar). *Jurnal Ilmiah Teknologi dan Komputer*, 2(3), 503-514. [E-Readiness Sistem Informasi Pemerintahan Daerah \(SIPD\) Menggunakan Metode TECHNOLOGY Acceptance Model \(TAM\) \(Studi Kasus Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar\) - Neliti](#)
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. cet. 1. Bandung: Alfabeta
- Siringoringo, H. (2005). *Seri TekHanifnik Riset Operasional: Pemrograman Linear*. Graha Ilmu.
- Tumija, Hendra, A., & Marja, S. (2023). Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Media Birokrasi*, 5(1), 79–91. <https://doi.org/10.33701/jmb.v5i1.3389>

Tumija, T., & Erlambang, P. A. (2023). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Anggaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Media Birokrasi*, 155–169. <https://doi.org/10.33701/jmb.v5i2.3696>

